DPMPTSP
KABUPATEN BATANG

RENCANA KERJA TAHUN 2027

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG



EMAIL
ptsp@batangkab.go.id

TELEPHONE
(0285)4493081

Jl. Urip Sumoharjo No.13, Sambongpos, Sambong,
Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51212

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....1
DAFTAR ISI 2
Daftar Tabel 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 LATAR BELAKANG 4
1.2 LANDASAN HUKUM 6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 9
BAB II 13
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPTSP Tahun 2026 dan Capaian Renstra daerah sampai dengan tahun 2025 13
Evaluasi Program Tahun 2026 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 40
Tugas Pokok : 43
Fungsi : 43
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51
BAB III 53
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 53
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 53
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang 53
3.3 Program dan Kegiatan 54
BAB IV 56
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 56
BAB V 59
PENUTUP 59

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kabupaten Batang 14
Tabel 2. 2 CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2026 32
Tabel 2. 3 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2027 42
Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Batang..... 47
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2027 Kabupaten Batang 51
Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Batang..... 52
Tabel 4. 1 Rumus Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Batang..... 57

BAB I
PENDAHULUAN

2.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang terintegrasi, kredibel, dan transparan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Penanaman Modal dan Perizinan PTSP berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2027 Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2027 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama- sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas keuangan memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2027 oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2027, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekaligus sebagai pedoman penyusunan anggaran DPMPTSP serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang merupakan penjabaran tahun kedua dari Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 yang memuat estimasi pelaksanaan Tahun 2027 serta rencana program dan kegiatan tahun 2027 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program.

2.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten BatangTahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2025– 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6);

    Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 11);

2.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2027 ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2027. Selain itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2027 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas sehari – hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, yaitu :

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP tahun 2027 yang merupakan implementasi dari Renstra DPMPTSP Tahun 2025 – 2029;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP tahun 2027;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan DPMPTSP dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

2.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2027 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2027.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta Susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP sampai dengan tahun 2025

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan realisasi Renstra DPMPTSP sampai dengan tahun 2025 yang mengacu pada Hasil Laporan Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan DPMPTSP berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam RENSTRA DPMPTSP.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Batang

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan DPMPTSP, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap tujuan dan sasaran, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2027.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan –temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan pada DPMPTSP Kabupaten Batang.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang direncanakan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Batang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENWAL SKPD) DPMPTSP Kabupaten Batang

Bagian ini menguraikan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPTSP Kabupaten Batang.

BAB IV. Rencana Awal (RANWAL SKPD) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan program dan kegiatan serta rencana pendanaan DPMPTSP tahun 2027.

4.1. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan program, kegiatan, indikator kinerja, target dan rencana pendanaan tahun 2027.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPTSP Tahun 2026 dan Capaian Renstra daerah sampai dengan tahun 2025

Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2026 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2027;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development)* untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi Program Tahun 2026

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebesar Rp 4.607.207.143,00,- (Empat milyar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan 6 program dan 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.886.331.198,00,- (Tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Kabupaten Batang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.054.626.001,00**		**5.498.917.820,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.054.626.001,00**		**5.498.917.820,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.054.626.001,00**		**5.498.917.820,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.868.097.186,00**		**4.473.578.570,00**	
		Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***3.868.097.186,00***		***4.394.499.632,00***	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.6 %		98.2 %	98.3 %	3.868.097.186,00	98.4 %	4.394.499.632,00	

	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.065.000,00		12.991.098,00	
		Jumlah Dokumen						1.065.000,00		12.991.098,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.065.000,00	5 Laporan	12.991.098,00	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.065.000,00		12.991.098,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	1.065.000,00	5 Laporan	12.991.098,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.563.838.657,00		2.537.801.300,00	
		Jumlah Dokumen						2.563.838.657,00		2.537.801.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	21.282.000,00	2 Dokumen	33.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	5.200.000,00	

			Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	89,29	19 Orang/bulan	19 Orang / bulan	2.542.556.657,00	19 Orang/bulan	2.499.001.300,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.542.556.657,00		2.499.001.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	89,29	19 Orang/bulan	21 Orang / bulan	2.542.556.657,00	19 Orang/bulan	2.499.001.300,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						21.282.000,00		33.600.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	21.282.000,00	2 Dokumen	33.600.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00		5.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	5.200.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						189.218.289,00		252.538.350,00	
		Jumlah Dokumen						189.218.289,00		252.538.350,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	99,99	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	4.283.136,00	

			Undangan yang Disediakan								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	98,94	12 Laporan	12 Laporan	64.223.289,00	12 Laporan	70.885.036,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	99,99	11 Paket	11 Paket	36.724.000,00	11 Paket	54.382.848,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	99,99	4 Paket	4 Paket	17.500.000,00	4 Paket	48.679.247,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	3.702.400,00	1 Paket	5.943.392,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	63.362.600,00	4 Paket	46.508.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	3.706.000,00	1 Paket	21.855.891,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.702.400,00		5.943.392,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	3.702.400,00	1 Paket	5.943.392,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.362.600,00		46.508.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket	63.362.600,00	4 Paket	46.508.800,00	DPMPTSP

	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.706.000,00		21.855.891,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	3.706.000,00	1 Paket	21.855.891,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36.724.000,00		54.382.848,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	99,99	11 Paket	11 Paket	36.724.000,00	11 Paket	54.382.848,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.500.000,00		48.679.247,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	99,99	4 Paket	4 Paket	17.500.000,00	4 Paket	48.679.247,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00		4.283.136,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	99,99	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	4.283.136,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						64.223.289,00		70.885.036,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	98,94	12 Laporan	12 Laporan	64.223.289,00	12 Laporan	70.885.036,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19.500.000,00		265.212.714,00	
		Jumlah Dokumen			96%			19.500.000,00		265.212.714,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	99,95	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	52.000.000,00	

			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	99,95	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	52.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	99,39	1 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	95.910.800,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100%	0 Unit	1 Unit	19.500.000,00	1 Unit	65.301.914,00	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00		52.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	99,95	0 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	52.000.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00		52.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	99,95	0 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	52.000.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00		95.910.800,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	99,39	1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	95.910.800,00	DPMPTSP

	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.500.000,00		65.301.914,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100%	0 Unit	1 Unit	19.500.000,00	1 Unit	65.301.914,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						932.020.240,00		720.686.863,00	
		Jumlah Dokumen						932.020.240,00		720.686.863,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98,01	12 Laporan	12 Laporan	340.220.000,00	12 Laporan	348.617.375,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95,95	12 Laporan	12 Laporan	591.300.240,00	12 Laporan	366.661.488,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	5.408.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00		5.408.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	5.408.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						340.220.000,00		348.617.375,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98,01	12 Laporan	12 Laporan	340.220.000,00	12 Laporan	348.617.375,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						591.300.240,00		366.661.488,00	

		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95,95	12 Laporan	12 Laporan	591.300.240,00	12 Laporan	366.661.488,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						162.455.000,00		657.269.307,00	
		Jumlah Dokumen						162.455.000,00		657.269.307,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,95	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	1 Unit	102.948.419,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	99,39	10 Unit	10 Unit	0,00	10 Unit	241.941.159,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	1 Unit	29.744.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0 Unit	1 Unit	17.650.000,00	1 Unit	50.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00		241.941.159,00	

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	99,39	10 Unit	0 Unit	0,00	10 Unit	241.941.159,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						35.000.000,00		102.948.419,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99,95	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	1 Unit	102.948.419,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.600.000,00		29.744.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	1 Unit	29.744.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						17.650.000,00		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0 Unit	0 Unit	17.650.000,00	1 Unit	50.000.000,00	DPMPTSP
			-	-		-	-	0,00	-	27.078.938,00	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00		27.078.938,00	

		-						0,00		27.078.938,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	100	-	-	0,00	-	27.078.938,00	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00		27.078.938,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	-	2 Orang	0,00	-	27.078.938,00	DPMPTSP
		Jumlah Dokumen						162.455.000,00		657.269.307,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	100	-	-	106.205.000,00	-	232.635.729,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						106.205.000,00		232.635.729,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	99,95	-	10 Unit	106.205.000,00	-	232.635.729,00	DPMPTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**40.050.465,00**		**234.381.000,00**	
		Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang kondusif						***40.050.465,00***		***234.381.000,00***	

			Persentase peningkatan jumlah investor	4 %	100	3.6 %	3.7 %	40.050.465,00	3.8 %	234.381.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						27.990.465,00		119.181.000,00	
		Jumlah Dokumen						27.990.465,00		119.181.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	99,16	1 Dokumen	1 Dokumen	7.580.000,00	1 Dokumen	35.901.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	87,98	1 Dokumen	1 Dokumen	20.410.465,00	1 Dokumen	83.280.000,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						20.410.465,00		83.280.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	87,98	1 Dokumen	1 Dokumen	20.410.465,00	1 Dokumen	83.280.000,00	DPMPTSP
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						7.580.000,00		35.901.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	99,16	1 Dokumen	1 Dokumen	7.580.000,00	1 Dokumen	35.901.000,00	DPMPTSP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						12.060.000,00		115.200.000,00	

		Jumlah Dokumen						12.060.000,00		115.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-	0	-	-	12.060.000,00	-	5.200.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-	0	-	-	0,00	-	110.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						0,00		110.000.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-	0	-	1 Dokumen	0,00	-	110.000.000,00	DPMPTSP
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						12.060.000,00		5.200.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-	0	-	1 Dokumen	12.060.000,00	-	5.200.000,00	DPMPTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**13.000.000,00**		**237.240.000,00**	
		Terlaksannya Kegiatan Promosi Penanaman Modal						***13.000.000,00***		***237.240.000,00***	
			Persentase Promosi di Kabupaten Batang	100 %	0	100 %	100 %	13.000.000,00	100 %	237.240.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						13.000.000,00		237.240.000,00	
		Jumlah Dokumen			0			13.000.000,00		237.240.000,00	

			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	162.240.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	75.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						13.000.000,00		162.240.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	162.240.000,00	DPMPTSP
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			0			0,00		75.000.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	75.000.000,00	DPMPTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**53.748.100,00**		**357.538.250,00**	
		Terlaksanannya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						***53.748.100,00***		***357.538.250,00***	
			persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	100 %	7	100 %	100 %	53.748.100,00	100 %	357.538.250,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						53.748.100,00		357.538.250,00	

		Jumlah Dokumen						53.748.100,00		357.538.250,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8 Pelaku Usaha	99,21	25 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	4.180.000,00	6 Pelaku Usaha	47.900.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5400 Pelaku Usaha	99,21	5300 Pelaku Usaha	5400 Pelaku Usaha	41.863.600,00	5500 Pelaku Usaha	274.478.250,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						41.863.600,00		274.478.250,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5400 Pelaku Usaha	88,12	5300 Pelaku Usaha	5400 Pelaku Usaha	41.863.600,00	5500 Pelaku Usaha	274.478.250,00	DPMPTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						4.180.000,00		47.900.000,00	

		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	95,05	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	4.180.000,00	6 Pelaku Usaha	47.900.000,00	DPMPTSP
		Jumlah Dokumen			7			53.748.100,00		357.538.250,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	95,05	-	-	7.704.500,00	-	35.160.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						7.704.500,00		35.160.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	95,05	-	42 Kegiatan Usaha	7.704.500,00	-	35.160.000,00	DPMPTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**46.917.500,00**		**127.400.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian						***46.917.500,00***		***77.400.000,00***	

		pelaksanaan Penanaman Modal									
			Persentase Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	100 %	86,64	100 %	100 %	46.917.500,00	100 %	77.400.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			9			46.917.500,00		127.400.000,00	
		Jumlah Dokumen			9			46.917.500,00		127.400.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	90,63	15 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	18.200.000,00	20 Kegiatan Usaha	27.400.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	75,85	20 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	14.117.500,00	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			1			14.117.500,00		50.000.000,00	

		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	75,85	20 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	14.117.500,00	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	DPMPTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			2			18.200.000,00		27.400.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	91,63	15 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	18.200.000,00	20 Kegiatan Usaha	27.400.000,00	DPMPTSP
		Jumlah Dokumen			9			46.917.500,00		127.400.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	91,63	-	-	14.600.000,00	-	50.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			6			14.600.000,00		50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	-	90,63	-	6 Kegiatan Usaha	14.600.000,00	-	50.000.000,00	DPMPTSP

		dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	merealisasikan Kegiatan Usahanya								
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			8			**32.812.750,00**		**68.780.000,00**	
		Terlaksananya Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			8			***32.812.750,00***		***68.780.000,00***	
			Prosentase Data yang telah dicukupi	100 %	99,92	100 %	100 %	32.812.750,00	100 %	68.780.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8			32.812.750,00		68.780.000,00	
		Jumlah Dokumen			8			32.812.750,00		68.780.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	35 Dokumen	99,92	23 Dokumen	25 Dokumen	32.812.750,00	27 Dokumen	68.780.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			8			32.812.750,00		68.780.000,00	

		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	35 Dokumen	99,92	23 Dokumen	25 Dokumen	32.812.750,00	27 Dokumen	68.780.000,00	DPMPTSP
	J U M L A H							**4.054.626.001,00**		**5.498.917.820,00**	

Tabel 2. 2 CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2026				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2026	
							TW I		TW II					
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5			6		7		8=6+7		9 =8/5	
	Tujuan: Meningkatkan realisasi nilai investasi	**Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang**	%	5			42		47		**47**		100,00	
	Sasaran: Meningkatnya jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang	**Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang**	%	3,6			59		6		**6**		100,00	
	Sasaran: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di DPMPTSP Kab. Batang	**Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP**	Angka	4,56			5		5		**5**		100,00	
	Sasaran: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di DPMPTSP Kab. Batang	**Nilai AKIP DPMPTSP**	Skor	76,60			77		77		**77**		99,93	

2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	98,2	3.707.855.957	4.054.683.867	100	804.585.680	95	1.323.367.583	**95**	2.127.953.263	96,47	57,39
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan	Laporan	6	12.011.000	12.011.000	5	3.501.000	3	1.011.000	**3**	4.512.000	50,00	37,57
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	12.011.000	12.011.000	5	3.501.000	3	1.011.000	**3**	4.512.000	50,00	37,57
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun		-	2.341.583.088	2.434.715.838		493.828.881		720.799.896	0	1.214.628.777	0,00	51,87
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	16	2.310.467.088	2.406.041.838	3	493.828.881	5	707.662.896	8	1.201.491.777	50,00	52,00
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	31.116.000	28.674.000	0	0	3	13.137.000	**3**	13.137.000	25,00	42,22
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat		-	25.000.000	0		0		0	**0**	0	0,00	0,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	44	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0,00	0,00
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	25.000.000	0	0	0	0	0	**0**	0	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan		97	233.521.900	187.234.800	26	58.003.673	31	48.320.558	57	106.324.231	58,76	45,53
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.495.000	5.495.000	3	3.071.000	3	431.600	6	3.502.600	50,00	63,74
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	43.000.000	37.197.100	3	13.126.100	3	12.908.200	6	26.034.300	50,00	60,54
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	20.207.000	5.198.000	3	3.143.000	3	1.508.980	6	4.651.980	50,00	23,02

2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.280.000	35.076.000	3	4.810.000	3	7.066.000	6	11.876.000	50,00	23,62	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	45.006.700	43.756.700	3	24.598.900	3	2.444.400	6	27.043.300	50,00	60,09	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.996.000	0	0	0	3	0	3	0	25,00	0,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	65.537.200	60.512.000	11	9.254.673	13	23.961.378	13	33.216.051	52,00	50,68	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan		-	88.675.000	28.112.000	2	0	3	27.650.000	3	27.650.000	0,00	31,18	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	88.675.000	28.112.000	2	0	3	27.650.000	3	27.650.000	100,00	31,18	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	669.298.560	895.882.320	9	230.671.109	10	229.934.148	9	460.605.257	0,00	68,82	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	5.000.000	3	1.500.000	3	2.000.000	3	3.500.000	25,00	70,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	322.316.360	241.817.180	3	66.241.647	3	69.609.904	3	135.851.551	25,00	42,15	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	341.982.200	599.065.140	3	162.929.462	4	158.324.244	7	321.253.706	58,33	93,94	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara		24	337.766.409	496.727.909	9	18.581.017	9	295.651.981	9	314.232.998	37,50	93,03	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	21	215.084.809	162.512.309	7	15.536.017	7	43.808.820	7	59.344.837	33,33	27,59	

	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	95.181.600	345.181.600	1	0	1	235.559.661	1	235.559.661	100,00	100,00
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	27.500.000	39.034.000	1	3.045.000	1	16.283.500	1	19.328.500	50,00	70,29
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi total terhadap target Investasi**	%	3,6	110.193.000	199.063.425	59	9.834.550	100	29.689.878	100	39.524.428	100,00	35,87
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang	Perusahaan	40	110.193.000	58.293.000	17	8.253.000	17	28.519.878	17	36.772.878	42,50	33,37
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	77.000.000	40.300.000	0	5.145.500	1	28.519.878	0	33.665.378	0,00	43,72
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	8	33.193.000	17.993.000	2	3.107.500	3	0	2	3.107.500	25,00	9,36
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia				140.770.425		1.581.550	0	1.170.000	0	2.751.550	0,00	0,00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen / Peta digital Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	140.770.425		1.581.550	0	1.170.000	0	2.751.550	0,00	0,00
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Promosi di Kabupaten Batang**	%	100	150.000.000	103.427.000	0	661.250	100	63.219.750	100	63.881.000	100,00	42,59
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase promosi di Kabupaten Batang	%	100	150.000.000	103.427.000	0	661.250	1	63.219.750	1	63.881.000	1,00	42,59
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	150.000.000	103.427.000	0	661.250	1	63.219.750	1	63.881.000	100,00	42,59

2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan**	%	100	346.890.200	123.152.200	100	18.388.000	100	13.264.000	100	31.652.000	100,00	9,12	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan			346.890.200	123.152.200	3.528	18.388.000	6.008	13.264.000	3.528	31.652.000	0,00	9,12	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	5200	270.136.250	82.678.250	3.377	11.630.500	5.967	8.151.000	5.967	19.781.500	100,00	7,32	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	200	44.246.450	17.946.450	151	1.790.000	25	1.263.000	176	3.053.000	88,00	6,90	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan USaha	25	32.507.500	22.527.500	0	4.967.500	16	3.850.000	16	8.817.500	64,00	27,12	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perushaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal**	%	100	120.000.000	78.180.000	100	1.718.250	100	31.433.500	100	33.151.750	100,00	27,63	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		250	120.000.000	78.180.000	10	1.718.250	57	31.433.500	57	33.151.750	22,80	27,63	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	25	40.000.000	25.600.000	10	1.088.350	10	4.141.500	10	5.229.850	40,00	13,07	

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	200	40.000.000	25.180.000	0	629.900	40	12.452.500	40	13.082.400	20,00	32,71
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan USaha	25	40.000.000	27.400.000	0	0	7	14.839.500	7	14.839.500	28,00	37,10
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data yang telah dicukupi**	%	100	63.591.651	48.700.651	100	0	100	7.695.050	100	7.695.050	100,00	12,10
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	Satuan	1	63.591.651	48.700.651	19	0	7	7.695.050	19	7.695.050	100,00	12,10
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	63.591.651	48.700.651	19	0	7	7.695.050	19	0	100,00	0,00
Jumlah dan Realisasi Anggaran Seluruh Program					**4.498.530.808**	**4.607.207.143**		**835.187.730**		**1.468.669.761**		**2.303.857.491**		

Dari tabel 2.1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi baik program maupun kegiatan di RENJA tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (92,11 %).

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2026

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2026 dengan usulan sebesar Rp. 4.607.207.143,00,- terurai dalam 6 program dan 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi capaian kinerja.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati Batang, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebagai koordinator bidang penanaman modal dan pelayanan PTSP. Diharapkan setiap program kegiatan pembangunan dan sistem akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat keberhasilan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan realisasi investasi daerah, yang ditunjukkan dengan masih atau selalu meningkat perolehan target dan capaian investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Kualitas pelayanan perizinan yang belum merata, terutama dalam hal kecepatan, kepastian waktu, dan konsistensi pelayanan di berbagai jenis perizinan.
3. Peningkatan pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik);
4. Keterbatasan integrasi sistem layanan berbasis elektronik,

sehingga proses perizinan belum sepenuhnya efektif, efisien, dan transparan.

5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya terkait kebijakan dan prosedur perizinan terbaru, termasuk implementasi sistem OSS (Online Single Submission).
6. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun pelayanan publik.
7. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, terutama dalam proses penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis.
8. Masih adanya kendala regulasi dan tumpang tindih kebijakan, yang dapat menghambat percepatan pelayanan dan realisasi investasi.
9. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan investasi yang belum maksimal, sehingga belum seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan perizinan berusaha dan non berusaha, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2025-2029, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan guna menciptakan kemudahan berusaha di daerah.

2. Penguatan implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) secara optimal dan terintegrasi.
3. Pengembangan dan peningkatan sistem layanan digital dalam mendukung proses perizinan dan nonperizinan.
4. Peningkatan kegiatan promosi potensi unggulan daerah secara terarah dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat melalui evaluasi dan inovasi layanan.
6. Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan stakeholder terkait dalam mendukung iklim investasi yang kondusif.
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN DPMPTSP;
2. Meningkatkan budaya kerja;
3. Meningkatkan kemampuan teknis fungsional ASN DPMPTSP;
4. Meningkatkan Kinerja Aparatur;
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan jangkauan akses informasi
6. Meningkatkan eksistensi DPMPTSP;
7. Meningkatkan koordinasi antar Penanaman Modal
8. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait;
9. Pemerataan tugas staff.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan dalam mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan akan pemenuhan anggaran belanja terus menerus mengalami

peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan hal tersebut yaitu :

1. Peningkatan jumlah realisasi investasi dan pendapatan retribusi perizinan di Kabupaten Batang;
2. Meningkatnya dukungan dari OPD terkait;
3. Kemampuan DPMPTSP dan sumber daya manusianya yang semakin meningkat dalam mendukung pelayanan;
4. Meningkatnya partisipasi lapisan pelaku usaha dan masyarakat dalam ketertarikan dan minat berinvestasi di Kabupaten Batang yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peningkatan peranan pelaku usaha tentang kepatuhan pada LKPM dan meningkatnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi; dan
6. Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan terus berkembang.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;
3. Penerapan sistem perencanaan yang semakin tertib, terarah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang maupun dengan perangkat daerah terkait;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pelayanan;
6. Meningkatnya kualitas data dan informasi sebagai dasar

penyusunan perencanaan;

7. Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
8. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan.

Tabel 2. 3 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2027

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang			3,5	3,6	3,7	9,1	3,6	3,70	
2	Indek Pelayanan Publik (IPP)			4,55	4,56	4,57	4,58	4,59	4,60	
3	Nilai SAKIP			76,55	76,60	76,70	76,60	76,60	76,70	

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1) Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.
2) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2025 terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor Nomor 11 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

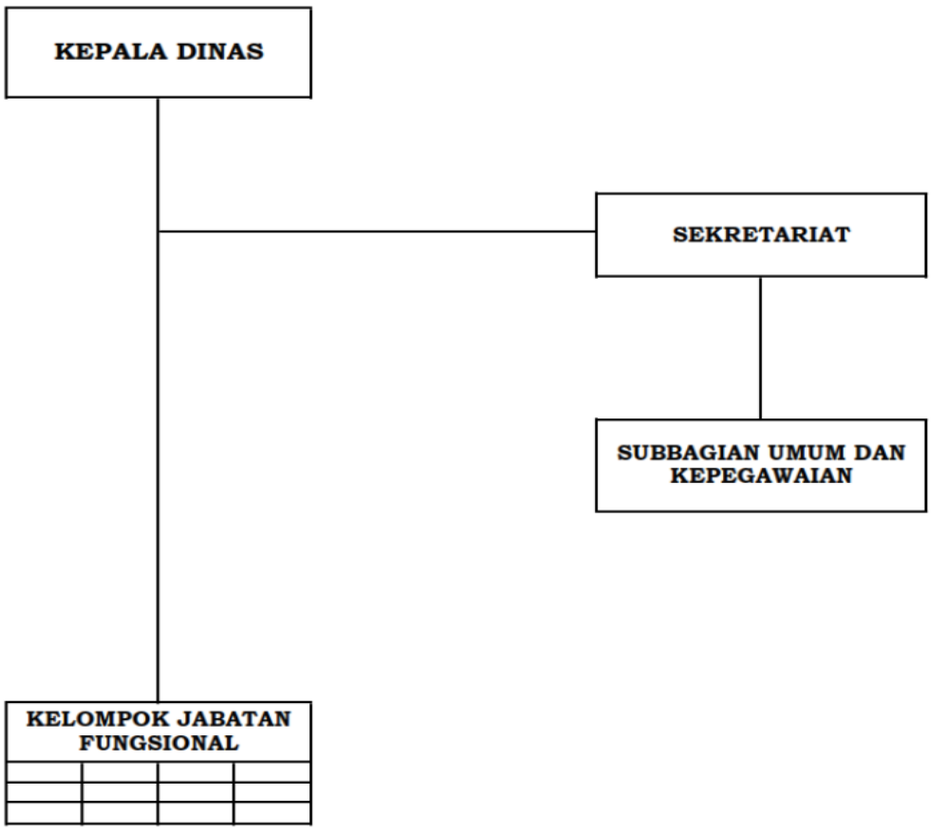
DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu – isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan termasuk adanya faktor –

faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dapat dijadikan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2027.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang antara lain :

Kekuatan adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan terbentuk sudah sangat sederhana, cepat, dan mudah bagi pelaku usaha;
2. Kebijakan Daerah dan dukungan instansi terkait terhadap perizinan dan investasi yang terintegrasi kuat;
3. Pemanfaatan sistem teknologi dan data informasi untuk pelayanan yang andal
4. Tersedianya unit layanan dan fasilitas pendukung teknis yang memadai.
5. Pelayanan perizinan terintegrasi melalui sistem digital (OSS).
6. Proses perizinan lebih cepat dan transparan.
7. Adanya kepastian regulasi untuk investasi.
8. SDM yang semakin kompeten dalam pelayanan publik.
9. Koordinasi dengan instansi teknis semakin baik.

Kelemahan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan masih berproses adaptasi dengan beberapa regulasi yang baru terkait pelayanan;
2. Kurangnya sumber daya manusia aparatur dengan kompetensi yang tinggi dan cepat beradaptasi dengan sistem pelayanan yang baru;
3. Keterbatasan SDM di bidang teknologi informasi dan investasi;
4. Gangguan sistem atau jaringan dapat menghambat pelayanan;
5. Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami layanan digital;
6. Koordinasi lintas instansi belum selalu optimal;
7. Anggaran untuk inovasi dan pengembangan pelayanan masih terbatas.

Peluang antara lain :

1. Peran Pemerintah Kabupaten Batang yang strategis dalam pembinaan SDM di Kabupaten Batang;
2. Meningkatnya minat investasi di daerah.
3. Dukungan pemerintah terhadap transformasi digital pelayanan publik.

4. Perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas layanan.
5. Kerja sama dengan dunia usaha dan investor semakin terbuka.
6. Potensi peningkatan pendapatan daerah melalui realisasi investasi.

Ancaman yang dihadapi antara lain :

1. Perubahan regulasi yang cepat sehingga memerlukan penyesuaian.
2. Persaingan antar daerah dalam menarik investor.
3. Ancaman keamanan siber terhadap sistem pelayanan digital.
4. Kondisi ekonomi global yang dapat menurunkan minat investasi.
5. Bencana alam atau keadaan darurat yang mengganggu pelayanan dan investasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2027. Review tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rupiah)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Realisasi total terhadap target Investasi	3,7	Rp. 119.600.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Realisasi total terhadap target Investasi	3,7	Rp. 119.600.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	1	Rp. 114.600.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	1	Rp. 114.600.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia	1	Rp. 5.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia	1	Rp. 5.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Promosi di Kabupaten Batang	100	Rp. 231.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Promosi di Kabupaten Batang	100	Rp. 231.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	1	Rp. 231.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	1	Rp. 231.000.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	35	Rp. 135.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	35	Rp. 135.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20	Rp. 135.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20	Rp. 135.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	88	Rp. 360.849.500	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	88	Rp. 360.849.500	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	70	Rp. 360.849.500	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	70	Rp. 360.849.500	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Data yang telah dicukupi	100	Rp. 66.135.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Batang	Persentase Data yang telah dicukupi	100	Rp. 66.135.000	
	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	Rp. 66.135.000	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	Rp. 66.135.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Batang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,3	Rp. 4.051.459.021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Batang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,3	Rp. 4.051.459.021	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5	Rp. 12.491.440	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5	Rp. 12.491.440	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	Rp. 2.440.245.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	Rp. 2.440.245.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	2	Rp. 26.037.440	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti	2	Rp. 26.037.440	

								Diklat			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	1	Rp. 242.825.336	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	1	Rp. 242.825.336	
	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Rp. 255.012.302	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Rp. 255.012.302	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	1	Rp. 696.070.502	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batang	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	1	Rp. 696.070.502	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batang	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	4,4	Rp. 378.776.201	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batang	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	4,4	Rp. 378.776.201	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bahwa proses perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah melalui mekanisme yang berlaku. Kemudian, untuk usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat belum ada usulan kegiatan yang masuk ke DPMPTSP. Untuk Renja tahun 2027 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun dari pemangku kepentingan.

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2027 Kabupaten Batang

SKPD : DPMPTSP KABUPATEN BATANG

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

NIHIL

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Batang

NO	JENIS BANTUAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	Penanggungjawab	Ketua	KETERANGAN
1	Liat dari sipd						
2							
3							
4							

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Nasional telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan Nasional yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
b. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.
c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.
e. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh.
f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
g. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam menetapkan tujuan dan sasaran telah selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang dan mendukung arah kebijakan Provinsi maupun Nasional.

Indikator kinerja program dan kegiatan dari DPMPTSP adalah terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor

– faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. Menumbuhkan minat investasi di Kabupaten Batang;
b. Meningkatkan realisasi investasi dan mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan ijin usaha; dan
c. Memberikan informasi tentang potensi/peluang investasi di Kabupaten Batang, untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang;
b. Meningkatnya realisasi nilai investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha; dan
c. Terinformasikannya Data Potensi/Peluang Investasi Kabupaten Batang (Batang Investa).

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2027 disusun berdasarkan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. Perencanaan tahun 2027 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029 dan Renstra DPMPTSP tahun 2025 - 2029. DPMPTSP sesuai dengan RPJMD Kabupaten Batang 2025-2029 melaksanakan misi ke-3 dan ke-4 yaitu Menjadikan Batang sebagai Pusat Industri dan Mendukung Hilirisasi Berbasis Alih Teknologi yang Ramah Lingkungan dan Akselerasi Ekonomi dengan tujuan Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera. Guna menunjang tercapainya target dalam misi tersebut maka diusulkanlah Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :
   a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
   b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :
   a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**.**
5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :
   a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, dengan kegiatan :
   a) Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan yang erat dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Arah kebijakan dan prioritas program pada sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dirancang sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan teknologi yang hijau dan berkelanjutan (Batang Clean Industrial City).

Program dan kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan misi daerah untuk mendukung pertumbuhan industri dan hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan serta akselerasi ekonomi. Peningkatan realisasi nilai investasi di Kabupaten Batang dilakukan dengan memperhatikan prinsip teknologi yang hijau dan keberlanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang.

Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dirancang secara sinergis dan saling mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan pendekatan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan 6 Program, 12 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja daerah serta mendukung tujuan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rumus Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Batang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target Investasi	Kabupaten Batang	3,7	Rp. 119.600.000			3,8	Rp. 124.381.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait pemberian fasilitasi / insentif dibidang Penanaman modal yang disusun	Kabupaten Batang	1	Rp. 114.600.000			1	Rp. 119.181.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia	Kabupaten Batang	1	Rp. 5.000.000			1	Rp. 5.200.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi di Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	100	Rp. 231.000.000			100	Rp. 237.240.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi yang dilaksanakan	Kabupaten Batang	1	Rp. 231.000.000			1	Rp. 237.240.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perushaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	Kabupaten Batang	35	Rp. 135.000.000			40	Rp. 150.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	20	Rp. 135.000.000			20	Rp. 150.000.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	Kabupaten Batang	88	Rp. 360.849.500			89	Rp. 375.260.000
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang diterbitkan	Kabupaten Batang	70	Rp. 360.849.500			75	Rp. 375.260.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data yang telah dicukupi	Kabupaten Batang	100	Rp. 66.135.000			100	Rp. 68.780.000
	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolahan data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batang	25	Rp. 66.135.000			27	Rp. 68.780.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batang	98,3	Rp. 4.051.459.021			98,4	Rp. 4.234.863.869
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kabupaten Batang	5	Rp. 12.491.440			5	Rp. 12.991.098
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kabupaten Batang	1	Rp. 2.440.245.800			1	Rp. 2.537.801.300

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Diklat	Kabupaten Batang	2	Rp. 26.037.440			2	Rp. 27.078.938
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan	Kabupaten Batang	1	Rp. 242.825.336			1	Rp. 252.538.349
	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batang	1	Rp. 255.012.302			1	Rp. 265.212.714
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah cakupan layanan operasional kantor	Kabupaten Batang	1	Rp. 696.070.502			1	Rp. 723.913.323
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pencapaian sarana dan prasarana yang dipelihara	Kabupaten Batang	4,4	Rp. 378.776.201			4,6	Rp. 415.328.148

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2027 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama di bidang urusan penanaman modal serta menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2027.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, sangat dipengaruhi pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, pelaku usaha, maupun kelompok masyarakat lainnya, kemudian juga ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan di Kabupaten Batang. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Rencana Kerja yang telah disusun ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Batang tahun 2025-2029 serta arah kebijakan RKPD Kabupaten Batang tahun 2027 dan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu seluruh aparat pelaksana di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berkewajiban untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja dengan sebaik – baiknya.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Batang Tahun 2027

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk peningkatan kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Batang, 31 Juli 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

MARGO SANTOSA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19770312 199803 1 002